



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG NEGARA PURWOKERTO

DJKN

LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

JALAN PAHLAWAN NOMOR 876 PURWOKERTO 53143
TELEPON : (0281) 630454; FAKSIMILE : (0281) 630451; SUREL : kpknlpurwokerto@kemenkeu.go.id

Senantiasa Melayani Anda dengan penuh PESONA

Profesionalisme, Efisien dan Efektif, Sinergi, Optimal, Nyaman dan Amanah

KATA PENGANTAR

Dalam upaya pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga *good governance* yang merupakan syarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara dapat terlaksana. Untuk itu setiap tahun anggaran berakhir instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya berdasarkan rencana strategis (renstra) yang telah ditetapkan sebelumnya, dalam hal ini renstra tahun 2020 s.d. tahun 2024.

Menindaklanjuti hal itu maka berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, KPKNL Purwokerto menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan maksud untuk mengukur kinerja KPKNL Purwokerto itu sendiri selama tahun anggaran 2025 sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas berdasarkan visi yang diembannya selama ini yaitu : *“MENJADI PENGELOLA KEKAYAAN NEGARA YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL UNTUK SEBESAR-BESAR KEMAKMURAN RAKYAT”*.

Pada tahun 2025 capaian kinerja KPKNL Purwokerto baik, dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) mencapai 116,57% yang terdiri dari *Stakeholder Perspective* 30%, *Customer Perspective* 20%, *Internal Process Perspective* 25% dan *Learning & Growth Perspective* 25%. Capaian tersebut merupakan kontribusi menyeluruh dari semua Indikator Kinerja Utama (IKU) KPKNL Purwokerto yang telah dilaksanakan oleh semua subbagian, seksi-seksi dan fungsional, sehingga secara keseluruhan capaian kinerja KPKNL Purwokerto dapat tercapai dengan baik.

Laporan Kinerja ini tersusun berkat kerja keras dan ketekunan para pihak yang terlibat dalam hal penyajian data yang diperlukan dan pengolahannya, untuk itu kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerja sama yang baik. Selanjutnya agar laporan ini dapat dipakai sebagai umpan balik dalam meningkatkan kinerja secara

bertahap dan berkesinambungan. Dengan dilandasi prinsip CARE (*Committed, Able, Responsive, and Enthusiastic*) serta dilandasi pula oleh nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan, maka tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai harapan.

Akhirnya dengan segala kekurangan yang ada, kami berharap Laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang memerlukan, disamping sebagai tolak ukur kegiatan saat ini dan masa yang akan datang.

Purwokerto, Januari 2026

Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik

Ali Mahmud



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja KPKNL Purwokerto ini disusun sebagai bagian dari perwujudan praktek *good governance* khususnya di lingkungan KPKNL Purwokerto dan sebagai laporan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Program Kerja DJKN Tahun 2025. Di samping itu selain berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta, juga akan bermanfaat bagi peningkatan kinerja di masa mendatang.

Pada tahun anggaran 2025, dari 8 sasaran strategis dengan 19 Indikator Kinerja Utama yang ditargetkan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahun 2025, seluruhnya dapat dilaksanakan dengan hasil yang baik yakni sebesar 116,57% untuk Capaian Nilai Kinerja Organisasi. Dalam upaya mewujudkan sasaran-sasaran ini KPKNL Purwokerto yang pada tahun 2025 mendapatkan alokasi dana DIPA (belanja barang dan modal) sebesar Rp 2.207.376.000,00 dapat kami realisasikan sebesar Rp 2.152.417.674,00 (dua miliar seratus lima puluh dua juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) atau dengan persentase realisasi anggaran sebesar **97,51%**.

Dengan terwujudnya sasaran-sasaran tersebut diharapkan pada akhirnya dapat memenuhi visi dan misi KPKNL Purwokerto. Capaian Kinerja dari 8 Sasaran Strategis dengan 19 IKU yang dilaksanakan KPKNL Purwokerto selama tahun 2025 menurut masing-masing perspektif dapat kami gambarkan sebagai berikut :

1. *Stakeholder Perspective* dengan bobot IKU 30% dengan nilai perspective sebesar 111,53%;
2. *Customer Perspective* dengan bobot IKU 20% dengan nilai perspective sebesar 116,35%;
3. *Internal Process Perspective* dengan bobot IKU 25% dengan nilai perspective 120%;
4. *Learning and Growth Perspective* dengan bobot IKU 25% dengan nilai perspective 119,35%.

Hasil capaian indikator kinerja utama sudah cukup baik namun demikian masih terdapat permasalahan atau hambatan yang menonjol pada tahun 2025 yaitu :

1. Potensi dari PNBPN yang berasal dari BLU berkurang. Satker BLU Unsoed berproses menuju PTNBH, sehingga nantinya tidak diakui lagi sebagai PNBPN Aset.
2. Beberapa aset yang telah disetujui sewa tahun lalu merupakan Sewa dibayar diawal sewa untuk jangka waktu 2-5 tahun, sehingga potensi pendapatan sewa berkurang.

3. Satker Strategis bukan dalam pengelolaan KPKNL Purwokerto seperti DJKA, Tanah LP Nusakambangan, TNI.
4. Penyebab masih rendahnya atensi penanggung utang dalam upaya menyelesaikan tagihannya, yaitu keadaan ekonomi penanggung utang yang tidak mampu serta telah berakhirnya program dari pemerintah berupa keringanan utang di Tahun 2025.
5. Banyaknya lelang Tidak Ada Penawaran (TAP).
6. KPKNL tidak mempunyai kontrol terhadap pelaksanaan lelang pegadaian.
7. Satuan kerja Pengadilan Agama Wonosobo tidak dapat dilakukan optimalisasi berupa sewa dikarenakan ada aturan internal yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak boleh membuka kantin di dalam area Pengadilan Wonosobo dan untuk sewa berupa ATM juga tidak dimungkinkan karena jarak 100 meter dari Pengadilan Agama sudah terdapat ATM Centre.
8. Satker atau pengguna layanan kurang memahami mengenai standar layanan yang diberikan KPKNL.
9. Terdapat penghematan anggaran di satker. Anggaran di salah satu Satker (BBWS SO) hanya tersedia 12,5% (karena penghematan) dari semula 100%. Namun target raw data K1 belum menyesuaikan dengan anggaran yang dihemat.
10. Dalam penggunaan SIMAN V2 user belum familiar dengan menu yang baru, dan alur perhitungan evaluasi kinerja harus berjenjang ke Kanwil.
11. Penyelesaian BKPN pada Tahun 2025 berasal dari BKPN yang telah diurus secara optimal dimana penanggung utang dalam kondisi ekonomi tidak mampu dan tidak ditemukan keberadaannya sehingga diterbitkan surat PSBDT sedangkan penyelesaian BKPN yang berasal dari pelunasan oleh penanggung utang belum terdapat realisasi karena kondisi penanggung utang secara ekonomi tidak mampu dan telah berakhirnya program pemerintah berupa keringanan utang.
12. Rendahnya akurasi tingkat kesesuaian basis data pada permohonan penilaian BMN yang diinput pada aplikasi satu kemenkeu dengan permohonan penilaian yang diinput pada aplikasi Sistem Informasi Penilaian (SIP).
13. Adanya pembatalan lelang oleh pemohon lelang karena debitur melakukan pembayaran atau pelunasan hutang.

Untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang perlu dirumuskan strategi pemecahan masalah antara lain :

1. Meningkatkan mutu layanan menuju pelayanan prima, profesional dan menggerakkan satuan kerja untuk melakukan utilisasi Kekayaan Negara;

2. Rapat koordinasi antara Kantor Pertanahan, Satker dan DJKN untuk mencapai kesepakatan mendasar terhadap kendala-kendala yang dihadapi
3. Monitoring dan evaluasi penyelesaian permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara dan menggerakkan satuan kerja untuk melakukan pengawasan dan pengendalian BMN, mengutilisasi Kekayaan Negara dan melakukan sertifikasi BMN;
4. Melakukan program pendataan, verifikasi dan sertifikasi aset BMN berupa tanah bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional;
5. Sosialisasi kepada satker terkait proses profiling calon penyewa.
6. Melakukan koordinasi dengan satker terkait penyelesaian BKPN;
7. Percepatan Penyelesaian Piutang Negara melalui *Crash Program*
8. Mengadakan Sosialisasi Lelang Pasal 6 UUHT sesuai PMK No. 122 Tahun 2023 kepada kepada Pihak Perbankan dan Lembaga Keuangan di Wilayah Kerja KPKNL Purwokerto dan sosialisasi lelang *e-auction*;
9. Melaksanakan koordinasi dengan Pemohon Lelang terkait syarat-syarat permohonan lelang yang harus dipenuhi, terutama lelang Hak Tanggungan dalam upaya pencapaian target organisasi terutama produktivitas lelang melalui permohonan sukarela khususnya lelang UMKM dari Perbankan.;
10. Melaksanakan penggalan potensi lelang sukarela;
11. Optimalisasi penggunaan aplikasi TIK dalam mendukung tugas dan fungsi diantaranya *e-auction* (Pelayanan Lelang) dan SIMAN (Pengelolaan Kekayaan Negara);
12. Menyelenggarakan sosialisasi secara berkesinambungan kepada *stakeholder* dalam rangka peningkatan pemahaman atas peraturan terkait seluruh tugas dan fungsi KPKNL;
13. Meningkatkan koordinasi dengan Kantor Wilayah, Kantor Pusat dan unit kerja eksternal baik instansi vertikal maupun Pemerintah Daerah;
14. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang terkait pengelolaan manajemen kinerja dan penerapan mitigasi risiko serta kepatuhan internal;
15. Meningkatkan kompetensi pegawai dengan menugaskan para pegawai untuk mengikuti berbagai diklat agar menjadi pegawai multi talenta;
16. Pelaksanaan *capacity building* internal pegawai KPKNL Purwokerto secara berkala;
17. Melakukan internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan, penerapan budaya kerja untuk mendukung Transformasi Kelembagaan;

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	vi
BAB I	PENDAHULUAN
	1
	A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
	1
	B. Peran Strategis
	3
	C. Sistematika Laporan
	5
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	6
	A. Penetapan Kinerja
	6
	B. Pengukuran Kinerja
	8
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	10
	A. Capaian Indikator Kinerja Utama
	10
	B. Evaluasi dan Analisis Kinerja
	12
	C. Realisasi Anggaran
	40
BAB IV	PENUTUP
	42

Daftar Lampiran : Kontrak Kinerja KPKNL Purwokerto tahun 2025

BAB I PENDAHULUAN

A. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 154/PMK.01/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto adalah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta.

Sebagai kantor pelayanan, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang Kekayaan Negara, Penilaian, dan Lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto menyelenggarakan fungsi :

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi, dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan Negara;
3. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. Pelaksanaan pelayanan lelang;
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang.
8. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
9. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
10. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto dipimpin oleh seorang Kepala, dengan susunan organisasi :

- a. Subbagian Umum;
- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;
- c. Seksi Piutang Negara;
- d. Seksi Hukum dan Informasi;
- e. Seksi Kepatuhan Internal;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri dari Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN Terampil, Jabatan Fungsional Pelelang, dan Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah.

Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto meliputi wilayah Kabupaten :

- | | |
|-----------------|--------------|
| a. Banyumas | e. Cilacap |
| b. Banjarnegara | f. Purworejo |
| c. Purbalingga | g. Wonosobo |
| d. Kebumen | |

Dalam melaksanakan tugasnya, KPKNL Purwokerto pada tahun 2025 didukung oleh 44 orang pegawai dengan posisi sebagai berikut :

- | | |
|---|--------------|
| a. Kepala Kantor | : 1 orang |
| b. Kepala Sub Bagian Umum dan Pelaksana | : 15 Pegawai |
| c. Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara dan Pelaksana | : 6 Pegawai |
| d. Kepala Seksi Piutang Negara dan Pelaksana | : 3 Pegawai |
| e. Kepala Seksi Hukum dan Informasi dan Pelaksana | : 7 Pegawai |
| f. Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Pelaksana | : 4 Pegawai |
| g. Pejabat Fungsional Pelelang | : 4 Pegawai |
| h. Pejabat Fungsional Penilai | : 3 Pegawai |
| i. Pejabat Fungsional Pranata Keuangan APBN Terampil | : 1 Pegawai |

Komposisi pegawai berdasarkan pangkat dan golongan (posisi tahun 2025) sebagai berikut:

No.	Golongan	Jumlah
1.	IV	4
2.	III	37
3.	II	3
	Total	44

Komposisi pegawai pada tahun 2025 berdasarkan tingkat pendidikan formal terakhir sebagai berikut :

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	S2	4
2.	S1/DIV	30
3.	D3	2
4.	D1	5
5.	SMA	3
6.	SMP	0
7.	SD	0
	Total	44

B. PERAN STRATEGIS

Sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang, KPKNL memiliki peran strategis sebagai berikut :

1. Melakukan Pengelolaan Kekayaan Negara

Sebagai pengelola kekayaan negara, KPKNL Purwokerto memiliki peran strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peningkatan daya guna dan hasil guna terutama difokuskan pada utilisasi kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara, pembinaan dan penatausahaan kekayaan negara. Sebagai *asset manager*, KPKNL Purwokerto mengemban tugas untuk menata manajemen aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas APBN melalui optimalisasi aset dalam bentuk peningkatan pendapatan negara, serta penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan.

2. Memberikan Pelayanan Pengurusan Piutang Negara

Peran strategis di bidang pengurusan piutang negara adalah dalam rangka menyelamatkan keuangan negara dengan mentransformasikan *Non Performing Loan* menjadi aset yang lebih *liquid* dan berdaya guna untuk mendukung pembangunan. Adapun proses tersebut dilaksanakan dengan melakukan penagihan dan pengelolaan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah dan badan-badan usaha yang dikuasai oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan, dan sebab apapun.

3. Memberikan Pelayanan Lelang

Pelayanan lelang bertujuan untuk menyediakan sarana transaksi penjualan aset di muka umum. Dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL Purwokerto secara terus menerus mengupayakan penggalan potensi lelang baik lelang eksekusi maupun noneksekusi sehingga diharapkan lelang dapat dijadikan sebagai salah satu sarana jual beli yang diminati oleh masyarakat (*sales mean auction*). Selain itu, lelang merupakan pelaksanaan suatu putusan/penetapan pengadilan maupun PUPN. Dalam pelaksanaan lelang terdapat beberapa keuntungan dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu lebih transparan, akuntabel, kompetitif, efisien, dan lebih menjamin kepastian hukum dengan adanya risalah lelang yang merupakan akta otentik. Risalah Lelang berfungsi sebagai *akta van transport* untuk kepentingan peralihan hak. Dengan keuntungan yang ditawarkan tersebut diharapkan KPKNL dapat ikut berperan mendukung penyelesaian kredit macet maupun *disposal asset*. DJKN dalam hal ini KPKNL Purwokerto diharapkan menjadi akselerator agar lelang lebih diminati masyarakat seperti pelaksanaan jual beli biasa dan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, maka metode penjualan melalui lelang juga turut berkembang, salah satunya implementasi penjualan lelang melalui aplikasi *e-auction*. Lelang melalui *e-auction* menjadi salah satu terobosan yang dilakukan guna menjawab perkembangan teknologi dan pola pikir masyarakat yang semakin maju dalam melakukan penjualan barang. Salah satu keunggulan *e-auction* yakni pelaksanaan lelang menjadi lebih praktis karena peminat lelang dapat menawar dari mana saja, tanpa perlu hadir langsung.

4. **Memberikan Kontribusi Pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ke Kas Negara**

Dalam memberikan pelayanan pengurusan piutang negara, DJKN melalui KPKNL Purwokerto memperoleh hasil berupa biaya administrasi (biad) Pengurusan Piutang Negara. Sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang, memperoleh hasil bea lelang yang selanjutnya disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak. Melalui optimalisasi pengelolaan BMN berupa pemanfaatan juga dapat meningkatkan penerimaan negara berupa PNBP.

C. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian LAPORAN KINERJA KPKNL Purwokerto Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif, yang menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai, beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, dan langkah-langkah antisipatif yang diambil.

Bab I. Pendahuluan, yang menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, dan peran strategis, serta sistematika laporan.

Bab II. Perencanaan Kinerja, yang menguraikan tentang rencana strategis dan penetapan kinerja KPKNL Purwokerto Tahun 2025.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja, menguraikan tentang pengukuran, sasaran, dan akuntabilitas pencapaian sasaran strategis KPKNL Purwokerto Tahun 2025.

Bab IV. Penutup, yang menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, permasalahan dan kendala, serta strategi pemecahannya untuk tahun mendatang.

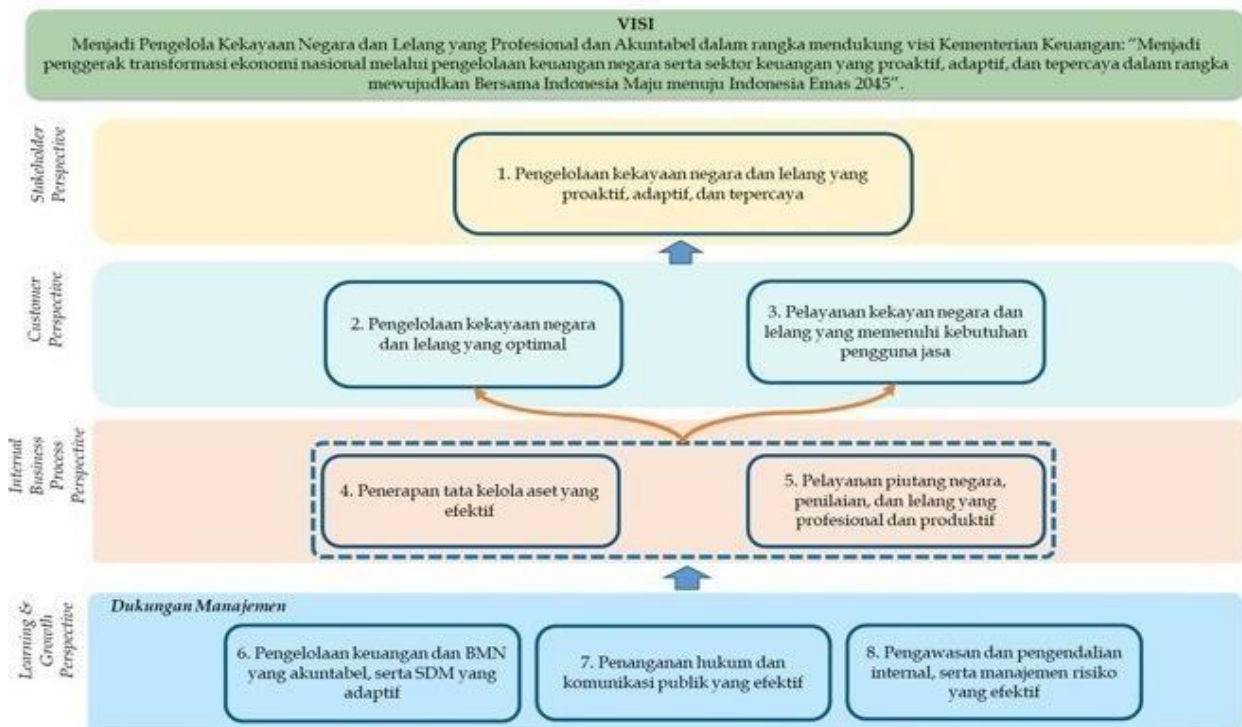
Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan, selama tahun 2025, KPKNL Purwokerto telah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti diuraikan dalam Bab II laporan ini. Dengan disusunnya LAPORAN KINERJA KPKNL Purwokerto Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan untuk meningkatkan kinerja KPKNL Purwokerto di tahun yang akan datang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PENETAPAN KINERJA

Sesuai kontrak Kinerja antara Kepala KPKNL Purwokerto dengan Kepala Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta yang ditandatangani pada tanggal 30 Januari 2025, maka KPKNL Purwokerto diberikan tugas untuk dapat mencapai target yang telah disepakati untuk tahun 2025.

Peta Strategi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara



Gambar 2.1 Peta Strategi DJKN

Jelas tergambar dari Peta Strategi diatas bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai 8 sasaran strategis yang terbagi dalam 4 *perspective* yang masing-masing sasaran strategis tersebut dijabarkan lagi kedalam Indikator Kinerja Utama sebagai kinerja yang harus dicapai dalam tahun bersangkutan. Peta Strategi tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 KPKNL Purwokerto sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWOKERTO
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	1a-CP	Indeks Integritas	100
		1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan Lelang	100%
2.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan asset negara	100%
		2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%
		2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%
3.	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
		3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77
4.	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5.	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
6.	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP	Indeks Kualitas Kinerja Anggaran	100
		6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
7.	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100
		7b-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	80
		8b-N	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	95,3%

Tabel 2.1 Kontrak Kinerja KPKNL Purwokerto Tahun 2025

B. PENGUKURAN KINERJA

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja KPKNL Purwokerto Tahun 2025, kami mengacu pada DJKN yang berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120 dan angka minimum adalah 0
2. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU.

Hijau	Kuning	Merah
$100 \leq X \leq 120$ Memenuhi ekspektasi	$80 \leq X < 100$ Belum memenuhi ekspektasi	$X < 80$ Tidak memenuhi ekspektasi

3. Apabila realisasi IKU sama dengan target, dimana target yang ditetapkan merupakan target maksimal yang dapat dicapai maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120.
4. Apabila realisasi IKU tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sesuai Kontrak Kinerja tahun 2025 KPKNL Purwokerto mempunyai 8 (delapan) Sasaran Strategis dan 19 (Sembilan belas) IKU Kemenkeu *Three*. Rincian capaian kinerja Kemenkeu *Three* KPKNL Purwokerto Tahun 2025 seperti telah disajikan pada tabel.

Capaian Kinerja KPKNL Purwokerto Tahun 2025 disajikan secara lengkap pada tabel berikut ini :

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA KPKNL PURWOKERTO TAHUN 2025

Kode	IKU	Polarisasi	V/C	Target s.d	Realisasi s.d.	Bobot IKU	Bobot Tertimbang IKU	Indeks Capaian IKU	Indeks Max. 120	Nilai Sasaran Strategis	Nilai Perspective
				Triwulan IV	Triwulan IV						
Stakeholder Perspective (30%)											
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	-								111,53	
1a-CP	Indeks Integritas	Max	P/L	100,00	105,29	19,00%	57,58%	105,29	105,29	60,62	111,53
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	Max	P/M	100,00%	158,47%	14,00%	42,42%	158,47	120,00	50,91	
Customer Perspective (20%)											
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	-								112,69	
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	Max	P/L	100,00%	100,00%	19,00%	36,54%	100,00	100,00	36,54	
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	Max	P/L	100,00%	138,89%	19,00%	36,54%	138,89	120,00	43,85	
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	Max	P/M	100,00%	133,44%	14,00%	26,92%	133,44	120,00	32,31	116,35
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	-								120,00	
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	Max	P/M	74,00	9809,13%	14,00%	50,00%	132,56	120,00	60,00	
3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	Max	P/M	77,00	9557,50%	14,00%	50,00%	124,12	120,00	60,00	

Internal Process Perspective (25%)											
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	-								120,00	120,00
4a-CP	Persentase BMN berupa tanah yang disertipkatkan	Max	P/M	100,00%	121,93%	14,00%	50,00%	121,93	120,00	60,00	
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	Max	P/M	100,00%	120,00%	14,00%	50,00%	120,00	120,00	60,00	
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	-								120,00	
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	Max	P/M	100%	124,90%	14,00%	33,33%	124,90	120,00	40,00	
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	Max	P/M	70%	101,14%	14,00%	33,33%	144,49	120,00	40,00	
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	Max	P/M	80,00%	115,03%	14,00%	33,33%	143,79	120,00	40,00	
Learning and Growth Perspective (25%)											
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	-								120,00	
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	Max	P/M	100,00	120,00	14,00%	33,33%	120,00	120,00	40,00	
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Max	P/M	100,00	120,00	14,00%	33,33%	120,00	120,00	40,00	
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	Max	P/M	80,00%	98,00%	14,00%	33,33%	122,50	120,00	40,00	
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	-								120,00	119,35
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	Max	P/M	100,00	120,57	14,00%	50,00%	120,57	120,00	60,00	
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	Max	P/M	80,00	116,00	14,00%	50,00%	145,00	120,00	60,00	
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	-								118,05	
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	Max	P/M	80,00	98,66	14,00%	50,00%	123,32	120,00	60,00	
8b-N	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	Max	P/M	95,30%	110,65%	14,00%	50,00%	116,11	116,11	58,05	
NKO										116,57	

Semua IKU dapat mencapai target dengan capain Nilai Kinerja Organisasi sebesar 116,57%.

B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

1. IKU Indeks Integritas.

✓ Isu utama dan implikasi terkait Integritas :

Isu Utama

- Pelaksanaan survei penilaian integritas terhadap seluruh K/L di Indonesia dalam rangka pencegahan korupsi.

Implikasi

- Peningkatan budaya integritas di seluruh organisasi Kementerian Keuangan yang dinilai menggunakan Survei Penilaian Integritas.

Penjelasan Capaian :

- Untuk Triwulan III capaian dihitung dari rencana aksi tindak lanjut hasil SPI yang telah selesai dilaksanakan s.d. TW III sebanyak 13 Kegiatan atau 120% sesuai nota dinas nomor : ND-940/WKN.09/2025 tanggal 1 Oktober 2025 .

Catatan :

- Sampai dengan Desember 2025 capaian belum ada karena realisasi perhitungan capaian baru diketahui pada bulan Januari 2026.

✓ Akar masalah :

Hasil survei kurang maksimal apabila terindikasi adanya tindakan korupsi/fraud yang dilakukan oleh pegawai kemenkeu c.q. DJKN.

✓ Tindakan yang telah dilaksanakan :

- Melakukan identifikasi titik rawan (Risk Profiling) praktik gratifikasi.
- Campaign / Internalisasi Pencegahan Pelanggaran Disiplin di Lingkungan DJKN.
- Pemetaan/Identifikasi benturan kepentingan serta melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan dimaksud.
- Melakukan pemantauan identifikasi titik rawan praktik gratifikasi.
- Pelatihan/internalisasi mengenai mekanisme dan prosedur layanan serta pengelolaan pengaduan.
- Publikasi infografis layanan sebagai bentuk edukasi/sosialisasi prosedur layanan kepada pengguna layanan.
- Campaign / Internalisasi Pencegahan Pelanggaran Disiplin di Lingkungan DJKN.
- Pemetaan/Identifikasi benturan kepentingan serta melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan dimaksud.
- Melaksanakan evaluasi program "Tali Kasih" khususnya terkait proses penyaluran/penggunaan dana dan efektifitas dampak program kepada pihak yang membutuhkan.

✓ Rekomendasi Rencana Aksi :

Monitoring pelaksanaan tindak lanjut hasil SPI

2. IKU Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan Lelang

Isu utama dan Implikasi

PKN :

Satker Strategis bukan dalam pengelolaan KPKNL Purwokerto seperti DJKA, Tanah LP Nusakambangan, TNI sedangkan PNBP Penerimaan hasil lelang bahan habis pakai pemilu Satker KPU dari 7 kabupaten cukup besar namun hanya terjadi 5 tahun sekali sehingga berdampak pada PNBP dari kekayaan negara rendah.

Piutang negara :

Rendahnya Biad PPN dikarenakan PH yg berpotensi melakukan pembayaran sangat sedikit dan apabila pembayaran dari PH, nilainya kecil sehingga hal ini menjadikan realisasi PNBP dari biad ppn rendah sehingga sd TW II target belum tercapai.

Lelang :

Mengoptimalkan penerimaan negara dari pengelolaan lelang.

Penjelasan Capaian IKU :

Realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang s.d. Triwulan IV 2025 sebesar **Rp 22.214.020.903,-** atau **158,47%** dari target tahunan sebesar **Rp14.018.000.000,-**

Berdasarkan Target tahunan sebagai berikut :

Uraian	Target (Tahunan)	Realisasi	Capaian %
Realisasi PNBP Kekayaan Negara	8.700.000.000	12.011.257.173	138,06%
Realisasi PNBP PN	18.000.000	4.457.253	24,76%
Realisasi PNBP Lelang	5.300.000.000	10.198.306.477	192,42%
TOTAL PNBP	14.018.000.000	22.214.020.903	158,47%

✓ Akar Masalah

Beberapa akar masalah yang menjadi perhatian yaitu :

PKN :

- Potensi dari PNBP yang berasal dari BLU berkurang. Satker BLU Unsoed

berproses menuju PTNBH, sehingga nantinya tidak diakui lagi sebagai PNBPAset.

- Beberapa aset yang telah disetujui sewa tahun lalu merupakan Sewa dibayar diawal sewa untuk jangka waktu 2-5 tahun, sehingga potensi pendapatan sewa berkurang.
- Satker Strategis bukan dalam pengelolaan KPKNL Purwokerto seperti DJKA, Tanah LP Nusakambangan, TNI.

PN :

Penyebab masih rendahnya atensi penanggung utang dalam upaya menyelesaikan tagihannya, yaitu keadaan ekonomi penanggung utang yang tidak mampu serta telah berakhirnya program dari pemerintah berupa keringanan utang di Tahun 2025.

Lelang :

- Banyak lelang TAP.
- KPKNL tidak mempunyai kontrol terhadap pelaksanaan lelang pegadaian.

✓ **Tindakan yang telah dilaksanakan**

PKN :

- Mengirim ND permintaan data ke KPPN Purwokerto, Purworejo, Cilacap, Banjarnegara
- Rekap data dari SLDK kantor pusat sebagai data awal penerimaan per tanggal 15.
- Rekap data LRA KPPN

PN :

- Penelitian lapangan terhadap penanggung utang an. PT. INDOMINERAL MULTI PRATAMA penyerahan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cilacap.
- Mengupayakan penebusan dan/atau lelang barjam penanggung utang an. Koperasi kampus unsoed penyerahan LPDB-KUMKM.
- Penagihan langsung penanggung utang penyerahan BPKPD Kab Kebumen, RSUD dr Soedirman Kebumen dan BPKPAD Kab Purworejo.
- Pemeriksaan terhadap PT. Vacation International Indonesia.
- Terkait tindak lanjut pengurusan penangung utang an. Koperasi Kampus Unsoed akan dilakukan koordinasi dengan penyerahan piutang LPDB KUMKM terkait lelang barang jaminan yang mengacu pada PMK No. 33 Tahun 2025.
- Melaksanakan penagihan langsung dan penelitian lapangan terhadap penanggung utang dan/atau penjamin utang.
- Melakukan penagihan melalui surat-surat dinas kepada penanggung utang dan/atau penjamin utang.
- Koordinasi dengan penyerah piutang dari BPKAD Provinsi Jawa Tengah.
- Penggalan potensi piutang negara pada RSUP dr. Sardjito Yogyakarta.

Lelang :

- Penggalan potensi lelang.
- Sosialisasi terkait pelaksanaan lelang kepada Pengguna Jasa.
- Melakukan verifikasi digital secepat mungkin dan sebanyak mungkin dengan harapan semakin banyak lelang semakin banyak objek yang laku.

✓ **Rekomendasi rencana aksi****PKN:**

- Rekap data PNBPN dari KPPN dan SLDK per tanggal 15 dan 30.
- Menyampaikan ND ke KPPN permintaan LRA.

PN :

- Koordinasi dan penggalan potensi piutang negara kepada penyerah hutang.

Lelang :

- Koordinasi dan penggalan potensi lelang kepada pemohon lelang.

3. IKU Tingkat optimalisasi pengelolaan asset negara.✓ **Isu Utama :**

Terdapat asset negara yang belum dilakukan optimalisasi secara maksimal serta belum ada surat persetujuan pemanfaatan.

✓ **Implikasi :**

Optimalisasi pengelolaan Aset tidak dapat dilakukan.

✓ **Penjelasan Capaian :**

Realisasi capaian s.d. Triwulan IV 2025

Tingkat optimalisasi melalui mekanisme penggunaan dan pemanfaatan 100%

Tingkat optimalisasi dari target NUP = $42/42 \times 100\% = 100\%$

Total = $(80\% \times 100\%) + (20\% \times 100\%) = 100\%$

Dengan target tahunan sebesar 100% maka capaian **100%**

✓ **Akar masalah**

Satuan kerja Pengadilan Agama Wonosobo tidak dapat dilakukan optimalisasi berupa sewa dikarenakan ada aturan internal yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak boleh membuka kantin di dalam area Pengadilan Wonosobo dan untuk sewa berupa ATM juga tidak dimungkinkan karena jarak 100 meter dari Pengadilan Agama sudah terdapat ATM Centre.

✓ **Tindakan yang telah dilaksanakan**

- Melakukan pendataan dan perhitungan sebanyak 9 NUP dari 42 NUP yang menjadi target pada tahun 2025.
- Mendokumentasi aset Tanah KPPBC TMPC Cilacap yang dioptimalisasi untuk penggunaan.
- Mendokumentasi aset KPKNL Purwokerto berupa tanah yang dioptimalisasi untuk penggunaan, dan aset Bangunan yang dioptimalisasi untuk pemanfaatan.
- Melakukan inventarisasi ulang pada SIMAN 2 untuk asset yang menjadi target yang sudah terdapat optimalisasi (pemanfaatan sewa/ pinjam pakai) akan di lakukan pendataan dan perhitungan terlebih dahulu.
- Mendorong satker untuk melakukan optimalisasi asset.
- Melakukan survey lapangan ke satker.

✓ **Rekomendasi rencana aksi**

Monitoring dan Melaporkan progres optimalisasi ke Kanwil DJKN

4. IKU Persentase realisasi pokok lelang

✓ **Isu utama dan implikasi:**

Mengoptimalkan penerimaan negara dari pengelolaan lelang sehingga berimplikasi pada peningkatan pokok lelang.

Penjelasan Capaian :

Realisasi pokok lelang s.d. Triwulan IV 2025 sebesar **Rp 277.114.912.583,- atau 138,89%** dari target tahunan sebesar **Rp 199,52 Milyar** dengan rincian sbb:

- Realisasi Pokok Lelang Kelas I sebesar **Rp 214.674.242.883-** dari target tahunan **Rp 125,6 Milyar**, capaian sebesar **170,92%**.
- Realisasi Pokok Lelang pegadaian sebesar **Rp 62.440.669.700,-** dari target tahunan **Rp 73,9 Milyar,-** capaian sebesar **84,49%**.

✓ **Akar Masalah**

- Banyak lelang TAP dari perbankan (lelang eksekusi Hak Tanggungan).
- KPKNL tidak mempunyai kontrol terhadap pelaksanaan lelang pegadaian.

✓ **Tindakan yang telah dilaksanakan:**

- Penggalan potensi lelang laku.
- Sosialisasi terkait pelaksanaan lelang kepada Pengguna Jasa.
- Melakukan verifikasi digital secepat mungkin dan sebanyak mungkin dengan harapan semakin banyak lelang semakin banyak objek yang laku.

✓ **Rekomendasi Rencana Aksi**

- Koordinasi dan penggalan potensi lelang kepada pemohon lelang.

5. IKU Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara

✓ **Isu utama dan Implikasi**

BKPN yg disertai barang jaminan dan asli dokumen dikuasai KPKNL hanya sekitar 7 BKPN dengan penanggung utang sebagian besar sudah tidak memiliki usaha, hal ini menjadikan dorongan penanggung hutang untuk melakukan pembayaran sangat rendah.

Penjelasan Capaian :

- Capaian persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara s.d. Triwulan IV 2025 sebesar **Rp 2.668.819.282,59** atau **133,44%** dari target tahunan sebesar **Rp 2.000.000.000,-**

✓ **Akar Masalah:**

Penyebab masih rendahnya atensi penanggung utang dalam upaya menyelesaikan tagihannya, yaitu keadaan ekonomi penanggung utang yang tidak mampu serta telah berakhirnya program dari pemerintah berupa keringanan utang di Tahun 2025.

✓ **Tindakan yang telah dilaksanakan:**

- Melakukan Penagihan langsung maupun panggilan kepada debitur.
- Melakukan koordinasi dengan LPDB-KUMKM.
- Memfasilitasi upaya penebusan barang jaminan dari penanggung utang an. Maria Yuniati.
- Melaksanakan lelang LPDB-KUMKM debitur Koperasi Kampus Unsoed.
- Pemeriksaan terhadap PT. Vacation International Indonesia.
- Terkait tindak lanjut pengurusan penanggung utang an. Koperasi Kampus Unsoed akan dilakukan koordinasi dengan penyerahan piutang LPDB KUMKM terkait lelang barang jaminan yang mengacu pada PMK No. 33 Tahun 2025.
- Melaksanakan penagihan langsung dan penelitian lapangan terhadap penanggung utang dan/atau penjamin utang.
- Melakukan penagihan melalui surat-surat dinas kepada penanggung utang dan/atau penjamin utang.
- Koordinasi dengan penyerah piutang dari BPKAD Provinsi Jawa Tengah.
- Penggalan potensi piutang negara pada RSUP dr. Sardjito Yogyakarta.

✓ **Rekomendasi Rencana Aksi**

- Melakukan koordinasi dan penggalan potensi piutang negara kepada

penyerah piutang

6. IKU Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi

✓ **Isu utama dan implikasi:**

Pengetahuan pengguna jasa terkait layanan masih rendah sehingga berimplikasi pada kecepatan proses bisnis layanan.

Penjelasan Capaian :

- Hasil Nilai Edukom PN TW IV = 93,96
- Hasil Nilai Edukom Jafung Pelelang TW IV = 89,08
- Rata-rata nilai edukom s.d. TW IV = 98,09
- Total capaian dengan target 74 = **132,56%**

✓ **Akar masalah**

Satker atau pengguna layanan kurang memahami mengenai standar layanan yang diberikan KPKNL.

✓ **Tindakan yang Telah Dilaksanakan:**

- Penyusunan materi/ rencana pelaksanaan edukasi Lelang oleh Jafung Pelelang yang disampaikan kepada Kanwil cq. Bidang tepat waktu.
- Ketepatan waktu penyampaian KAK edukasi dan komunikasi oleh Seksi PN.
- Melaksanakan edukasi, komunikasi kepada satker/pemohon pada triwulan II 2025 sesuai nota dinas yang telah disampaikan pada triwulan I.
- Edukom lelang : Penyusunan materi/ rencana pelaksanaan edukasi Q4 yang disampaikan kepada Kanwil cq. Bidang Lelang tepat waktu.
- Edukom PN : Melaksanakan edukasi, komunikasi kepada satker/pemohon pada triwulan IV.
- Edukom lelang : Melaksanakan edukasi, komunikasi kepada satker/pemohon pada triwulan IV.

✓ **Rekomendasi Rencana Aksi:**

Menyusun rencana pelaksanaan edukom tahun 2026.

7. IKU Indeks kepuasan pengguna layanan

✓ **Isu utama dan implikasi:**

Isu Utama:

Pada tahun 2025, Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan melakukan penataan mekanisme survei layanan pada seluruh unit di lingkungan Kementerian Keuangan dengan menggunakan media digital (e-SKPL). Output dari pengolahan data e-SKPL digunakan oleh seluruh unit di lingkungan Kementerian Keuangan untuk penyusunan laporan survei serta pengisian capaian Indeks/tingkat Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL), Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP), dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) setiap periodik

Implikasi:

Hasil pelaksanaan SKPL digunakan sebagai tolak ukur untuk mengetahui tingkat kepuasan dan opini/pendapat pengguna layanan atas kualitas layanan yang diselenggarakan dan integritas pegawai Kementerian Keuangan.

Penjelasan capaian :

Realisasi sesuai tautan dari biro organta <https://bit.ly/HasilCapaianSKPLDJKNQ2>. untuk triwulan IV 2025 sebesar 96,80.

Rata-rata realisasi s.d. Triwulan IV 2025 sebesar 95,58 dengan target 77 maka capaian sebesar **124,12%**

✓ **Akar Masalah**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.01/2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan dengan mekanisme survei berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. e-SKPL perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat dan sebagai bahan evaluasi unit kerja untuk melakukan perbaikan atas pemberian pelayanan.

✓ **Tindakan yang telah dilaksanakan**

Melaksanakan penyebaran kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat menggunakan e-SKPL TW I s.d. TW IV 2025.

✓ **Rekomendasi Rencana Aksi:**

Melaksanakan penyebaran kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat menggunakan e-SKPL.

8. IKU Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan

✓ **Isu utama dan implikasi:**

Penyelesaian K3 yang berbeda dengan tahun sebelumnya (2024), eviden untuk tiap2 permasalahan k3 belum jelas outputnya.

Penjelasan Capaian :

Realisasi Sertifikasi s.d. Triwulan IV 2025 berdasarkan target bidang yaitu :

| K1: 216/204 | K2: 0/0 | K3: 757/594 | K4: 0/0 | Total 973 Bidang

Realisasi persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan s.d. Triwulan IV 2025 sebesar **121,93%** dari target tahunan 100% (798 bidang).

✓ **Akar Masalah:**

Terdapat penghematan anggaran di satker. Anggaran di salah satu Satker (BBWS SO) hanya tersedia 12,5% (karena penghematan) dari semula 100%. Namun target raw data K1 belum menyesuaikan dengan anggaran yang dihemat.

✓ **Tindakan yang Telah Dilaksanakan:**

- Koordinasi dengan satker, kanwil, dan kantor pusat terkait dengan target awal dan penghematan.
- Mengikuti zoom rapat teknis dan arahan Dit. PKKN.
- Menyampaikan ND ke KPKNL Semarang sebagai Pembina Satker terkait target yang berlokus di wilayah kerja KPKNL Purwokerto.
- Bersurat ke 18 Satker terkait penyampaian target sertifikasi.
- Penyampaian permohonan SK Penlok ke Kantah Purbalingga, Banjarnegara, Purworejo, Wonosobo, Kebumen, Cilacap dan Banyumas.
- Koordinasi dengan KPKNL Semarang dan Satker Zidam IV/Diponegoro.
- Koordinasi dengan KPKNL Jakarta 1 terkait target subordinasi PJKA.
- Rapat koordinasi Dengan BBWS-SO.
- Rapat koordinasi dengan Satker Zidam dan Kantah Cilacap.
- Permohonan SK Penlok Ke Kantah untuk BBWS-SO.

- Menghadiri undangan koordinasi Kanwil.
- Menghadiri Undangan sosialisasi dari kantah.
- Koordinasi ke Kantah-Kantah untuk strategi penyelesaian sertipikasi 2025.
- Koordinasi dengan satker untuk penyelesaian target.

✓ **Rekomendasi Rencana Aksi:**

Koordinasi ke Kantah-Kantah dan satuan kerja untuk strategi penyelesaian sertipikasi 2026.

9. IKU Persentase evaluasi kinerja BMN

✓ **Isu utama dan implikasi :**

Satker sudah membuat jawaban dan mengirimkan bukti atas tindaklanjut hasil evakin, namun tidak terdapat menu untuk mengupload pada siman V2.

Penjelasan Capaian :

Realisasi **evaluasi kinerja dan rekomendasi** BMN s.d. Triwulan IV 2025 tercapai 402 NUP dari target 335 NUP atau 120%.

Realisasi Pencapaian **Tindak lanjut** dari sebanyak 59 Paket dari target 17 paket atau maksimal 120%.

$$\begin{aligned} \text{Perhitungan Capaian IKU} &= (50\% \times 120\%) + (50\% \times 120\%) \\ &= 120\% \end{aligned}$$

Sehingga capaian evaluasi Kinerja BMN s.d. Triwulan 2025 dari target tahunan 100% yaitu **120%**.

✓ **Akar Masalah**

Dalam penggunaan SIMAN V2 user belum familiar dengan menu yang baru, dan alur perhitungan evaluasi kinerja harus berjenjang ke Kanwil.

✓ **Tindakan yang telah dilaksanakan :**

- Internalisasi tatacara penghitungan evaluasi kinerja BMN dengan Aplikasi Siman V2.
- Menyusun longlist detail target.
- Bersurat ke BPS untuk mendapatkan data indicator.
- Koordinasi dengan satker untuk data awal dan Data RKA-KL.
- Melakukan evaluasi kinerja BMN ke satker dan menyampaikan rekomendasi evaluasi kinerja ke Satker.
- Menghubungi pic satker untuk menjawab surat rekomendasi Evaluasi Kinerja.

- Melakukan survey dan evaluasi kinerja BMN ke satker.
- Menyampaikan rekomendasi hasil evaluasi kinerja ke Satker.

✓ **Rekomendasi Rencana Aksi :**

Monitoring rekomendasi hasil evaluasi kinerja Satker

10. IKU Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara

✓ **Isu utama dan implikasi :**

Jumlah BKPN semakin berkurang dan jumlah penyerahan juga semakin sedikit.

Penjelasan Capaian :

Realisasi penyelesaian berkas piutang negara s.d. Triwulan IV 2025 sebanyak **113 BKPN dengan bobot 128,40 (dihitung dengan pembobotan 1,2X41 BKPN dan 1,1X72 BKPN) dari target raw data tahunan 102,8 sehingga capaian sd. Triwulan IV 2025 sebesar 124,90%.**

✓ **Akar masalah:**

Penyelesaian BKPN pada Tahun 2025 berasal dari BKPN yang telah diurus secara optimal dimana penanggung utang dalam kondisi ekonomi tidak mampu dan tidak ditemukan keberadaannya sehingga diterbitkan surat PSBDT sedangkan penyelesaian BKPN yang berasal dari pelunasan oleh penanggung utang belum terdapat realisasi karena kondisi penanggung utang secara ekonomi tidak mampu dan telah berakhirnya program pemerintah berupa keringanan utang.

✓ **Tindakan yang telah dilaksanakan :**

- Optimalisasi Pengurusan Piutang Negara.
- Dilakukan penagihan langsung dan pemanggilan kepada penanggung utang.
- Mengirimkan surat tagihan penyelesaian hutang yang ditujukan kepada PH/PjH.
- Menerbitkan surat PSBDT untuk BKPN yang pengurusannya telah optimal.
- Melakukan penagihan melalui surat-surat dinas kepada penanggung utang dan/atau penjamin utang.

✓ **Rekomendasi Rencana Aksi :**

Melakukan koordinasi dan penggalian potensi piutang negara kepada penyerah piutang.

11. IKU Tingkat kualitas layanan penilaian

✓ **Isu utama dan implikasi :**

Mengukur akurasi tingkat kesesuaian basis data yang berimplikasi pada penyelesaian laporan penilaian tepat waktu.

Penjelasan Capaian :

Realisasi tingkat kualitas layanan penilaian triwulan IV 2025 sebesar 102,08% rata-rata realisasi s.d. triwulan IV 2025 sebesar 101,14% dengan target 70% maka capaian sebesar **144,49%**.

✓ **Akar masalah:**

Rendahnya akurasi tingkat kesesuaian basis data pada permohonan penilaian BMN yang diinput pada aplikasi satu kemenkeu dengan permohonan penilaian yang diinput pada aplikasi Sistem Informasi Penilaian (SIP).

✓ **Tindakan yang telah dilaksanakan :**

- Menyelesaikan laporan penilaian tepat waktu.
- Memenuhi dokumen dan semua persyaratan penilaian sehingga nilai kaji ulang diatas 85.
- Akurasi Data Layanan Penilaian mengukur tingkat kesesuaian basis data pada permohonan penilaian BMN yang diinput pada aplikasi satu kemenkeu dengan permohonan penilaian yang diinput pada aplikasi Sistem Informasi Penilaian (SIP).
- Koordinasi dengan pemohon/satker terkait input permohonan penilaian pada aplikasi SIP.

✓ **Rekomendasi Rencana Aksi :**

Monitoring dan Koordinasi dengan pemohon/satker terkait input permohonan penilaian pada aplikasi SIP.

12. IKU Persentase produktivitas lelang

✓ **Isu utama dan implikasi :**

Banyaknya permohonan lelang yang dibatalkan oleh penjual berimplikasi pada perhitungan produktivitas lelang karena akan mengurangi jumlah frekuensi dan presentase lelang laku.

Penjelasan Capaian :

Realisasi produktifitas lelang s.d. triwulan IV 2025 sebesar 115,03% dengan target tahunan 80% maka capaian sebesar **143,79%**.

✓ **Akar masalah:**

Adanya pembatalan lelang oleh pemohon lelang karena debitur melakukan pembayaran atau pelunasan hutang.

✓ **Tindakan yang telah dilaksanakan:**

Koordinasi dan penggalan potensi lelang kepada pemohon lelang.

✓ **Rekomendasi Rencana Aksi:**

Koordinasi dan penggalan potensi lelang kepada pemohon lelang.

13. IKU Indeks Kualitas Kinerja Anggaran✓ **Isu utama dan implikasi :****Isu utama:**

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7) Nilai kinerja anggaran Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan hasil penjumlahan dari: a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Implikasi:

Perhitungan IKPA sampai dengan saat ini belum ada, sesuai dengan Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor S-50/PB.2/2025 Tanggal 02/02/2025 hal Penyesuaian Data dan Perhitungan Indikator IKPA Periode Triwulan I TA 2025, dilakukan penyesuaian data dan perhitungan penilaian dengan memberikan nilai 100 untuk seluruh indikator penilaian IKPA selama Triwulan I TA 2025.

Penjelasan Capaian IKU :

Nilai Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran s.d. Desember 2025 :

Target IKU IKKPA : 100

Realisasi IKU IKKPA s.d. November 2025 (konversi) : 120

Indeks Capaian Kinerja IKU IKKPA s.d. Desember 2025 : 120%

✓ Akar masalah:

- Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025, dilakukan efisiensi atas anggaran belanja TA 2025 yang berdampak pada pelaksanaan anggaran Kementerian Lembaga dan pada akhirnya mempengaruhi penilaian indikator kinerja pada IKPA.
- Selain itu, berdasarkan informasi dari Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, terdapat pengembangan Aplikasi SAKTI yang berdampak terhadap layanan keuangan kepada Satker pada periode Februari 2025 yang mempengaruhi penilaian indicator kinerja pada IKPA.

✓ Tindakan yang telah dilaksanakan :

Melaksanakan Anggaran sesuai ketentuan yang berlaku, serta merealisasikan anggaran sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) yang telah disusun.

✓ Rekomendasi Rencana Aksi :

Melaksanakan Realisasi Anggaran Sesuai Rencana Penarikan Dana.

14. IKU Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa**✓ Isu utama dan implikasi :**

Adanya perbedaan aplikasi yang digunakan untuk menginput realisasi anggaran dan pencatatan realisasi pengadaan yaitu aplikasi SAKTI dan SPSE sehingga dibutuhkan waktu untuk merekap dan menginput kembali data hasil cetakan SAKTI ke dalam sistem SPSE sehingga data sering tidak seimbang antara realisasi anggaran pada SAKTI dengan realisasi pengadaan pada SPSE.

Penjelasan capaian :

Capaian IKU = (Realisasi ITKP + Realisasi P3DN) / 2

Komponen IKU:

Realisasi IKU Semester I = Realisasi Komponen Perencanaan (Komitmen)

Realisasi IKU Semester II = Realisasi Komponen Pelaksanaan

Berdasarkan data monitoring dari kantor pusat, persentase realisasi capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa adalah:

Capaian IKU = (100% x 60%) + (100% x 40%) = 121% capaian maksimal **120%**.

✓ **Akar masalah:**

Dikarenakan adanya revisi anggaran karena adanya efisiensi, sehingga menyebabkan perbedaan data yang diproses oleh sistem pengadaan dengan data dari sistem anggaran. Selanjutnya perlu lebih optimal lagi dalam penginputan realisasi pengadaan baik melalui web LPSE Kemenkeu maupun melalui simpel Kemenkeu agar realisasi capaian dapat terinput secara maksimal.

✓ **Tindakan yang telah dilaksanakan:**

Melakukan update inputan data pada sistem perencanaan pengadaan dengan menggunakan data PAGU Anggaran terbaru serta melakukan penginputan realisasi pengadaan pada aplikasi pengadaan.

✓ **Rekomendasi Rencana Aksi:**

Monitoring terhadap perubahan data anggaran dan segera untuk melakukan penginputan realisasi pengadaan.

15. IKU Persentase pengembangan kompetensi pegawai

✓ **Isu utama dan implikasi :**

Isu Utama :

Pemenuhan target jamlat dalam IKI Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan pengembangan kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat, baik pada IDP maupun aplikasi diklat pegawai serta pemenuhan pemanggilan diklat dari Sekretariat DJKN. Pencapaian IKI sangat bergantung pada kepatuhan pegawai dalam melaksanakan pemanggilan diklat serta pelaksanaan usulan diklat oleh masing-masing pegawai melalui aplikasi diklat.

Implikasi :

Dalam hal seluruh pegawai melaksanakan pemenuhan minimal 25 JP, dengan minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi, serta memenuhi seluruh pemanggilan diklat, maka target standar kompetensi pegawai akan terwujud.

Penjelasan capaian :

a. Penguatan Budaya dan Bintang Pejabat Administrator capaian

b. Pemenuhan JP dan Pemanggilan Pelatihan

Capaian IKU = (Komponen I x 80%) + (Komponen II x 20%)

Capaian Komponen A = 90%

Capaian Komponen B = [(44/44) x 80%] + [(17/17)*20%] = 100%

Total capaian Komponen A dan B = 118,75%

✓ **Akar masalah:**

Dalam penggunaannya, aplikasi diklat cukup memudahkan untuk merekapitulasi usulan diklat pegawai, namun karena masih dalam proses pengembangan, seringkali pegawai terkendala kehilangan data usulan diklat yang telah disubmit, sehingga usulan perlu diulang secara berkala dan berjenjang. Hal ini menyebabkan pegawai gagal mengikuti diklat yang diminati karena kuota diklat telah terpenuhi oleh pegawai lain, sehingga dapat mempengaruhi komponen II dalam realisasi IKI ini.

✓ **Tindakan yang telah dilaksanakan :**

- Menginformasikan secara berkala jenis pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan.
- Melakukan rekap data pelatihan/diklat yang telah diselesaikan pegawai berikut data dukungnya berkala setiap bulan.
- Menyusun konsep ND secara berkala terkait pemberitahuan pimpinan unit bagi seluruh pegawai untuk melaksanakan pendaftaran pelatihan melalui aplikasi pelatihan yang tersedia serta menginformasikan secara berkala pelatihan diluar diklat yang dapat diklaim jam pelatihannya (KLC2, seminar, webinar, dll) untuk diusulkan ke kantor pusat sebagai JP.

✓ **Rekomendasi Rencana Aksi :**

Monitoring dan menginformasikan secara berkala pelatihan diluar diklat yang dapat diklaim jam pelatihannya (KLC2, seminar, webinar, dll) untuk diusulkan ke kantor pusat sebagai JP.

16. IKU Indeks penanganan permasalahan hukum

✓ **Isu utama dan implikasi:**

Isu Utama :

Penyelesaian atas gugatan dengan hasil putusan menang pada semua tingkatan

peradilan (Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Kedua dan Mahkamah Agung) sehingga tidak menimbulkan kerugian pada organisasi (terutama atas gugatan dengan petitum disertai ganti rugi).

Implikasi :

Penanganan penyelesaian atas gugatan sesuai tahapan perkara di pengadilan, untuk diupayakan tercapainya suatu perdamaian antara para pihak/akte van dading (selesai pada tahapan mediasi) sehingga perkara tidak dilanjutkan ke tahapan persidangan lebih lanjut , namun apabila perdamaian tidak tercapai maka KPKNL Purwokerto harus mengikuti semua tahapan persidangan (proses jawab menjawab dan pembuktian)

Penjelasan capaian IKU:

Indeks Penanganan Permasalahan Hukum di Pengadilan 117,65%

Indeks Putusan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap : 132,25%

Total $(80\% \times 117,65\%) + (20\% \times 132,25\%) = 120,57\%$

Deviasi PNBPN : selisih data OMSPAN >< Focus PN = 0,0%

Realisasi nilai deviasi merupakan rata-rata dari kedua deviasi tersebut s.d. Desember 2024 sebesar 0,0% atau 120%.

✓ **Akar masalah:**

Adanya gugatan yang menjadikan KPKNL Purwokerto sebagai pihak dalam suatu perkara bermula dari adanya pelaksanaan lelang atas suatu objek lelang yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang berdasarkan permohonan dari Pemohon Lelang.

✓ **Tindakan yang telah dilaksanakan :**

Mengikuti semua tahapan persidangan dalam suatu perkara baik dalam tahapan yang memerlukan kehadiran dimuka persidangan (offline) maupun melalui ecourt kalender yang telah ditetapkan oleh majelis hakim (Online).

✓ **Rekomendasi Rencana Aksi**

Melakukan monitoring terkait penanganan permasalahan hukum.

17. IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)✓ **Isu utama dan implikasi :****Isu utama:**

Derasnya arus informasi yang diterima oleh publik saat ini, membuat pemerintah memandang perlu untuk membuka akses informasi kepada masyarakat, agar publik dapat memperoleh informasi secara resmi dan lengkap mengenai pelaksanaan pemerintahan melalui berbagai saluran informasi. Guna pemenuhan hak dasar masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan juga telah diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik (UU KIP).

Pemberian layanan informasi publik oleh PPID di lingkungan Kementerian Keuangan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan. PPID Kementerian Keuangan dan PPID Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan bertanggung jawab untuk melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Keuangan.

Implikasi:

Implikasi layanan informasi publik PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) adalah meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.

Penjelasan capaian IKU :

Ketepatan waktu penyampaian informasi publik atas permintaan informasi publik dari pengguna layanan 120

Ketepatan waktu penyampaian laporan informasi publik 120

Ketepatan waktu penyediaan dan pemutakhiran informasi publik pada website 100

Total $(60\% \times 120) + (20\% \times 120) + (20\% \times 100) = 116$

Dengan target 80 maka capaian **120%**

✓ **Akar masalah**

Ketidaktahuan masyarakat tentang permohonan informasi dan tidak terinformasikannya informasi yang dikecualikan.

✓ **Tindakan yang telah dilaksanakan :**

- Menyusun Laporan PPID Tahunan.
- Menyediakan dan melakukan pemutakhiran data informasi publik pada Website.
- Menyampaikan informasi publik atas permintaan informasi publik dari pengguna layanan.
- Memantau permintaan informasi publik.
- Memberikan penjelasan kepada pemohon informasi tentang langkah-langkah permohonan informasi dan bagaimana mendapatkan informasi pada layanan APT.

✓ **Rekomendasi Rencana Aksi**

Monitoring informasi sesuai ketentuan di website dan memberikan penjelasan kepada pemohon informasi serta menindaklanjuti.

18. IKU Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko

✓ **Isu utama dan implikasi:**

Isu Utama :

Nilai Indeks Manajemen Kinerja dan Risiko menjadi indikator utama pengukuran terhadap kualitas pengelolaan kinerja baik organisasi maupun kinerja pegawai serta risiko organisasi.

Implikasi :

Indeks Manajemen Kinerja dan Risiko untuk memperoleh nilai yang maksimal.

Penjelasan Capaian s.d. Triwulan IV 2025 :

Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko terdiri dari 2 komponen yaitu

a. Realisasi Nilai Kualitas Manajemen Kinerja (60%)

Kinerja Organisasi (30%) nilai 98.86

Kinerja Pegawai (30%) Nilai 99.59

b. Realisasi Nilai Kualitas Manajemen Risiko (40%) Nilai 97.86

Total realisasi sebesar

Dengan target tahunan 80 maka capaian s.d. Triwulan IV 2025 sebesar **123,25%**

✓ **Akar masalah**

- Baik/buruk pengelolaan Manajemen Kinerja dan Risiko tidak dapat diukur apabila tidak dilakukan pengukuran atas kualitas manajemen kinerja dan risiko.
- Tingkat kepatuhan pegawai dalam melaksanakan proses evaluasi kinerja dan akuntabilitas laporan kinerja masing-masing.

✓ **Tindakan yang telah dilaksanakan :**

- Melaksanakan self assessment penilaian melalui kertas kerja manajemen kinerja dan risiko secara detail serta melaporkan kepada UPK/UPR di atasnya setiap triwulan.
- Reviu Pengelolaan Manajemen Kinerja pegawai dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek yaitu: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi serta efektivitas edukasi.

✓ **Rekomendasi Rencana Aksi**

Monitoring pelaksanaan kinerja (organisasi dan pegawai) serta risiko tahun 2026.

19. IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti

✓ **Isu utama dan implikasi**

Isu Utama :

Adanya temuan hasil pemeriksaan itjen tahun 2024 yang penyelesaian laporan hasil temuannya harus ditindaklanjuti maksimal 31 Maret 2025, yaitu terkait pemusnahan kertas sekuriti.

Implikasi :

Seluruh rekomendasi hasil temuan Itjen telah ditindaklanjuti tepat waktu.

Penjelasan capaian IKU :

Sesuai ND dari kantor pusat capaian yang telah selesai di tindak lanjuti atau realisasi 100% dari target 95,3% maka capaian **104,93%**

✓ **Akar masalah**

Itjen melakukan pemeriksaan mendadak atas proses bisnis layanan lelang pada tahun 2024 dan di temukan 9 temuan yang harus ditindaklanjuti.

✓ **Tindakan yang telah dilaksanakan :**

Menindaklanjuti seluruh hasil temuan Itjen.

✓ **Rekomendasi Rencana Aksi**

Monitoring hasil temuan Itjen yang telah ditindaklanjuti berdasarkan nota dinas dari kantor pusat.

❖ **Laporan Pelaksanaan Inisiatif Strategis**

SS/IKU Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian/ Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

Inisiatif Strategis: Kompetisi Inovasi Manajer Aset (KOIN MAS) DJKN

Penjelasan

Koin mas KPKNL Purwokerto mengangkat Pemanfaatan BMN Berupa Sebagian Tanah dan/atau Bangunan Pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kebumen Sebagai Usaha Pertanian

Tahap/Progress

- Pembayaran Sewa senilai Rp.10.600.000 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 4 Juli 2024.
- Penandatanganan Perjanjian sewa antara penyewa dengan Rutan Kebumen Nomor Perjanjian Sewa W13.PAS.PAS.36.PB.03.02-1157 tanggal 4 Juli 2024.

Kegiatan

Q1: Inventarisasi terhadap aset yang akan diberdayakan/ dimanfaatkan

Q2: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan

Q3: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan

Q4: Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Output

Q1: Daftar Asset yang Akan diberdayakan/ dimanfaatkan

- Q2: Laporan Kegiatan Monitoring
Q3: Laporan Kegiatan Monitoring
Q4: Laporan Hasil Evaluasi Kegiatan

✓ **Rencana aksi:**

Wasdal pelaksanaan sewa

❖ **Matriks Tindak Lanjut Rencana Aksi DKO Triwulan III Tahun 2025**

1. Melaksanakan rencana aksi tindak lanjut hasil SPI pada TW IV 2025 berupa:
 - a. Campaign / Internalisasi Pencegahan Pelanggaran Disiplin di Lingkungan DJKN.
 - b. Pemetaan/Identifikasi benturan kepentingan serta melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan dimaksud.
 - c. Melaksanakan evaluasi program "Tali Kasih" khususnya terkait proses penyaluran/penggunaan dana dan efektifitas dampak program kepada pihak yang membutuhkan.

Tindak lanjut Seksi Kepatuhan Internal dan Subbag Umum:

SS infografis Pencegahan Pelanggaran Disiplin melalui WA Group.

Monev atas penanganan benturan kepentingan

ND-143/KNL.090605/2025 tgl 3 November 2025

ND-173/KNL.090605/2025 tgl 8 Desember 2025

ND-929/KNL.0906/2025 tgl 9 Desember 2025

Laporan penyelenggaraan Tali Kasih

ND-926/KNL.0906/2025 tgl 8 Desember 2025

2. **PKN:**

- Rekap data PNBPN dari KPPN dan SLDK per tanggal 15 dan 30
- Menyampaikan ND ke KPPN permintaan LRA

PN :

- Pemeriksaan terhadap PT. Vacation International Indonesia
- Terkait tindak lanjut pengurusan penanggung utang an. Koperasi Kampus Unsoed akan dilakukan koordinasi dengan penyerahan piutang LPDB KUMKM terkait lelang barang jaminan yang mengacu pada PMK No. 33 Tahun 2025

- Melaksanakan penagihan langsung dan penelitian lapangan terhadap penanggung utang dan/atau penjamin utang
- Melakukan penagihan melalui surat-surat dinas kepada penanggung utang dan/atau penjamin utang
- Koordinasi dengan penyerah piutang dari BPKAD Provinsi Jawa Tengah
- Penggalan potensi piutang negara pada RSUP dr. Sardjito Yogyakarta

Lelang :

- Koordinasi dan penggalan potensi lelang kepada pemohon lelang
- Sosialisasi terkait pelaksanaan lelang kepada Pengguna Jasa

Tindak Lanjut:

Sumber rekap data SLDK:

ND-1562/KNL.2/2025 tanggal 19-11-2025

Penyampaian ND Permintaan data ke KPPN:

ND-744/KNL.0906/2025 tanggal 06-10-2025

ND-805/KNL.0906/2025 tanggal 28-10-2025

ND-892/KNL.0906/2025 Tanggal 28-11-2025

ST-2653/KNL.0906/2025 tanggal 23 Oktober2025

pemeriksaan dan penelitian lapangan terhadap pengurus PT. Vacational International Indonesia

ST-2576/KNL.0906/2025 tanggal 21 Oktober2025 Melakukan penagihan kepada Ketua Koperasi Kampus Unsoed, Sdr. Herliana.

ST-2822/KNL.0906/2025 tanggal 14 November2025

penagihan sekaligus dengan pemberitahuan surat paksa, penelitian lapangan.

S-4307/KNL.0906/2025 tgl 20 Novemver 2025

Panggilan atas nama Hamdoyo

ST-2713/KNL.0906/2025tanggal 29 Oktober 2025

Koordinasi dengan BPKAD Provinsi Jawa Tengah

S-4509/KNL.0906/2025 tanggal 12 Desember 2025 Permohonan Data Potensi Piutang Negara

ST-3083/KNL.0906/2025 tgl 19 Desember 2025

koordinasi sekaligus penggalan potensi lelang kepada pengguna jasa lelang di wilayah Kab. Purbalingga

ST-2956/KNL.0906/2025 tanggal 27 November 2025
Dan Notula Sosialisasi Pralelang Pemkab Banyumas

3. Seksi Piutang Negara:

- Melaporkan progres optimalisasi ke Kanwil DJKN.
- Melakukan survey lapangan ke satker.

Tindak lanjut:

Penyampaian Laporan:

ND-723/KNL.0906/2025 tanggal 01-10-2025

ND-895/KNL.0906/2025 tanggal 28-11-2025

4. Jabfung Pelelang:

- Koordinasi dan penggalan potensi lelang kepada pemohon lelang.
- Sosialisasi terkait pelaksanaan lelang kepada Pengguna Jasa.

Tindak lanjut:

ST-3083/KNL.0906/2025 tgl 19 Desember 2025

koordinasi sekaligus penggalan potensi lelang kepada pengguna jasa lelang di wilayah Kab. Purbalingga

ST-2956/KNL.0906/2025 tanggal 27 November 2025

Dan Notula Sosialisasi Pralelang Pemkab Banyumas

5. Seksi Piutang Negara:

- Pemeriksaan terhadap PT. Vacation International Indonesia.
- Terkait tindak lanjut pengurusan penanggung utang an. Koperasi Kampus Unsoed akan dilakukan koordinasi dengan penyerahan piutang LPDB KUMKM terkait lelang barang jaminan yang mengacu pada PMK No. 33 Tahun 2025.
- Melaksanakan penagihan langsung dan penelitian lapangan terhadap penanggung utang dan/atau penjamin utang.
- Melakukan penagihan melalui surat-surat dinas kepada PH dan/atau penjamin utang.
- Koordinasi dengan penyerah piutang dari BPKAD Provinsi Jawa Tengah.
- Penggalan potensi piutang negara pada RSUP dr. Sardjito Yogyakarta

Tindak lanjut:

ST-2653/KNL.0906/2025 tanggal 23 Oktober2025

pemeriksaan dan penelitan lapangan terhadap pengurus PT. Vacational International Indonesia

ST-2576/KNL.0906/2025 tanggal 21 Oktober2025 Melakukan penagihan kepada Ketua Koperasi Kampus Unsoed, Sdr. Herliana.

ST-2822/KNL.0906/2025 tanggal 14 November2025

penagihan sekaligus dengan pemberitahuan surat paksa, penelitian lapangan.

S-4307/KNL.0906/2025 tgl 20 Novemver 2025

Panggilan atas nama Hamdoyo.

ST-2713/KNL.0906/2025tanggal 29 Oktober 2025

Koordinasi dengan BPKAD Provinsi Jawa Tengah

S-4509/KNL.0906/2025 tanggal 12 Desember 2025 Permohonan Data Potensi Piutang Negara

6. Melaksanakan edukasi, komunikasi kepada satker/pemohon pada triwulan IV 2025.

Tindak lanjut Seksi Piutang Negara dan Jabfung Pelelang:

S-3690/KNL.0906/2025 tgl 7 Oktober 2025

Pelaksanaan Sosialisasi Pengelolaan dan Penghapusan Piutang Daerah

ST-2956/KNL.0906/2025 tanggal 27 November 2025

Dan Notula Sosialisasi Pralelang Pemkab Banyumas

7. Melaksanakan penyebaran kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat menggunakan e-SKPL.

Tindak Lanjut Seksi PN, Seksi PKN, JFPP dan Jabfung Pelelang:

S-4408/KNL.0906/2025 tanggal 27 November 2025

Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL) TW IV KPKNL Purwokerto Tahun 2025

8. Seksi PKN

- Koordinasi ke Kantah-Kantah untuk strategi penyelesaian sertifikasi 2025.
- Koordinasi dengan satker untuk penyelesaian target

Tindak lanjut:

ST-2941/KNL.0906/2025tanggal 26-11-2025

ST-2942/KNL.0906/2025 tanggal 27-11-2025

ST-3025/KNL.0906/2025 tanggal 11-12-2025

ST-2767/KNL.0906/2025 tanggal 6-11-2025

9. Seksi PKN

- Melakukan survey dan evaluasi kinerja BMN ke satker.
- Menyampaikan rekomendasi hasil evaluasi kinerja ke Satker.

Tindak lanjut:

Pemberitahuan pelaksanaan survei:

S-4368/KNL.0906/2025 tanggal 24-11-2025

S-4330/KNL.0906/2025 tanggal 21-11-2025

Penyampaian Rekomendasi:

S-4002/KNL.0906/2025 tanggal 27-10-2025

S-3992/KNL.0906/2025 tanggal 27-10-2025

10. Seksi PN

- Menerbitkan surat PSBDT untuk BKPN yang pengurusannya telah optimal.
- Melakukan penagihan melalui surat-surat dinas kepada penanggung utang dan/atau penjamin utang

Tindak lanjut:

PSBDT-51/PUPNC.15.04/2025 tgl 24 November 2025 PSBDT a.n. Salim

S-4297/KNL.0906/2025 tgl 20 November 2025

Tagihan penyelesaian hutang an Eka Esti S

11. Jafung Penilai

- Koordinasi dengan pemohon/satker terkait input permohonan penilaian pada aplikasi SIP

Tindak lanjut:

LAP-2900/KNL.0906/2025 LPT Koordinasi dengan pemohon/satker terkait input permohonan pada aplikasi SIP

12. Jafung Pelelang

- Koordinasi dan penggalan potensi lelang kepada pemohon lelang
- Sosialisasi terkait pelaksanaan lelang kepada Pengguna Jasa

Tindak lanjut:

ST-3083/KNL.0906/2025 tgl 19 Desember 2025

koordinasi sekaligus penggalan potensi lelang kepada pengguna jasa lelang di wilayah Kab. Purbalingga

ST-2956/KNL.0906/2025 tanggal 27 November 2025

Dan Notula Sosialisasi Pralelang Pemkab Banyumas

13. Subbagian Umum

- Melaksanakan Realisasi Anggaran Sesuai Rencana Penarikan Dana

Tindak lanjut:

ND-1735/KNL.090601/2025 tgl 5 November 2025

Penyampaian Monitoring Anggaran s.d 31 Oktober 2025

14. Subbagian Umum

- Senantiasa melakukan monitoring terhadap perubahan data anggaran dan segera untuk melakukan penginputan realisasi pengadaan

Tindak lanjut:

Screenshot Monitoring dan Konfirmasi Capaian ITKP_Pengadaan

15. Subbagian Umum

- Menyusun konsep ND secara berkala terkait pemberitahuan pimpinan unit bagi seluruh pegawai untuk melaksanakan pendaftaran pelatihan melalui aplikasi pelatihan yang tersedia serta menginformasikan secara berkala pelatihan diluar diklat yang dapat diklaim jam pelatihannya (KLC2, seminar, webinar, dll) untuk diusulkan ke kantor pusat sebagai JP

Tindak lanjut:

ND-947/KNL.0906/2025 tanggal 16 Desember 2025

Informasi Pengembangan Kompetensi dan Imbauan Pembaruan Data Riwayat Diklat/Riwayat Pendidikan bagi Pegawai KPKNL Purwokerto.

16. Seksi HI

- Meningkatkan ketelitian dalam memahami dalil dalam posita gugatan, sehingga dapat mengcounter semua dalil yang disampaikan pengugat berdasarkan ketentuan petunjuk pelaksanaan lelang
- Berkomunikasi dengan Pejabat Lelang terkait pelaksanaan lelang dan dokumen pendukung atas objek lelang yang digugat oleh termohon lelang

Tindak lanjut:

Permohonan Surat Kuasa Khusus Perkara No23PdtG2025PN Kbm dan Jawaban Perkara Perdata Nomor : 34/Pdt.G/2025/PN Bms

LAP-169/KNL.090604/2025 tgl 6 Oktober 2025 laporan pendampingan Pejabat Lelang dalam rangka Klarifikasi pada Direktorat Krimsus Polda Jateng

17. Seksi HI

- Secara berkala melakukan update informasi sesuai ketentuan di website dan memberikan penjelasan kepada pemohon informasi serta menindaklanjuti.

Tindak lanjut:

SS bukti update informasi sesuai ketentuan di website

18. Subbagian Umum Dan Seksi KI

- Melaksanakan self assesment penilaian melalui kertas kerja manajemen kinerja dan risiko
- Menjaga pelaksanaan Pengelolaan Manajemen Kinerja pegawai dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek yaitu: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi serta efektivitas edukasi secara berkala

Tindak lanjut:

Kertas kerja self assesment penilaian manajemen kinerja dan risiko s.d. TW IV tahun 2025

ND-963/KNL.0906/2025 tgl 22 Desember 2025 Informasi Kinerja Pegawai - Evaluasi Kinerja Triwulan IV 2025 di Lingkungan KPKNL Purwokerto

ND-933/KNL.0906/2025 tgl 10 Desember 2025

Imbauan Pelaksanaan DKI Bulan Desember Tahun 2025 dan penetapan HEK-DEK TW IV 2025

19. Subbagian Umum Dan Seksi KI

- Monitoring hasil temuan Itjen yang telah ditindaklanjuti. Berdasarkan nota dinas dari kantor pusat

Tindak lanjut:

ND-3429/KN.1/2025 tanggal 20 Oktober 2025

Penyampaian Update Monitoring Tindak Lanjut dan Rekapitulasi Pending Matters Pengawasan Inspektorat Jenderal per 15 Oktober 2025

C. REALISASI ANGGARAN

Selama Tahun Anggaran 2025 seluruh pembiayaan kegiatan bersumber dari DIPA tahun 2025. Dana yang dianggarkan dalam DIPA KPKNL Purwokerto Tahun Anggaran 2025 sesuai nomor SP DIPA- 015.09.2.537770/2024 tanggal 02 Desember 2024 adalah sebesar Rp 3.585.804.000,00 (tiga miliar lima ratus delapan puluh lima juta delapan ratus empat ribu rupiah). Terdapat pemblokiran sebesar Rp1.378.428.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian Belanja Barang senilai Rp 294.342.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan Belanja Modal Rp1.084.086.000,00 (satu miliar delapan puluh empat juta delapan puluh enam ribu rupiah). Selama TA 2025 telah dilakukan revisi DIPA sebanyak sebelas 11 (sebelas) kali. Realisasi penggunaan anggaran TA 2025 sebesar Rp 2.152.417.674,00 (dua miliar seratus lima puluh dua juta empat ratus tujuh belas ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) atau dengan persentase realisasi anggaran sebesar **97,51%**.

Adapun realisasi anggaran sebesar **97,51%** tersebut, rinciannya adalah sebagai berikut :

1. Belanja Modal

Dana yang dianggarkan untuk belanja modal pada tahun 2025 adalah sebesar Rp 115.042.000,00 (seratus lima belas juta empat puluh dua ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 111.579.986,00 (seratus sebelas juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) atau sebesar **96,99%**.

2. Belanja Barang

Dana yang dianggarkan untuk belanja barang pada tahun 2025 adalah sebesar Rp 2.092.334.000,00 (dua miliar sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 2.040.837.688,00 (dua miliar empat puluh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) atau sebesar **97,54%**. Sejak mulai tahun 2021 anggaran belanja pegawai sudah terpusat pada DIPA Eselon I bahkan pada akhir 2022 secara bertahap diahlikan pada DIP Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, sehingga unit vertikal tidak memperoleh pagu belanja pegawai.

Terdapat perbedaan persentase realisasi anggaran menurut Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi capaian IKU, dimana berdasarkan laporan realisasi anggaran, penyerapan sebesar **97,51%** (belanja barang dan modal) sedangkan menurut realisasi capaian IKU sebesar **120%**. Hal ini terjadi karena pada realisasi capaian IKU selain memperhitungkan penyerapan anggaran juga memperhitungkan pencapaian keluaran riil, nilai efisiensi, dan pencapaian konsistensi, dimana dalam memperhitungkan capaian IKU tersebut terdapat formula penghitungannya sendiri dan masing-masing realisasi penyerapan anggaran, realisasi pencapaian keluaran riil, realisasi efisiensi dan realisasi konsistensi memiliki pembobotan tersendiri dalam formula penghitungannya.

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN

Secara umum Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto telah melaksanakan kinerja selama periode Tahun Anggaran 2025 dengan sangat baik. Seluruh target atas 8 (delapan) Sasaran Strategis dengan total 19 Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Kontrak Kinerja *Kemenkeu Three* KPKNL Purwokerto Tahun 2025 dapat tercapai dengan sempurna, bahkan melebihi target. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang berasal dari capaian Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan pada awal tahun anggaran tercapai sebesar 116,57% dari nilai maksimal 120%.

Salah satu prestasi KPKNL Purwokerto yang berhasil dicapai pada tahun 2025 yaitu:

1. Juara 1 Lomba Pengelolaan Arsip Unit Vertikal DJKN Tahun 2025 tingkat DJKN; dan
2. Juara Terbaik 1 Kategori Ketertiban Risalah Lelang Tahun 2025 tingkat Kantor Wilayah.

Hal ini perlu agar dapat menunjukkan konsistensi KPKNL Purwokerto dalam peningkatan kinerja dalam melakukan berbagai perbaikan menuju kesempurnaan.

Dari apa yang telah dipaparkan di atas, tentu tidak lepas dari faktor-faktor pendukung, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kerja sama dari satuan kerja yang mulai menyadari tentang arti penting pengelolaan Aset Negara;
2. Dukungan antar seksi yang memadai dalam pelaksanaan penilaian BMN;
3. Motivasi tinggi yang dimiliki pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
4. Hubungan yang telah terjalin dengan para *stakeholder*;
5. Animo masyarakat untuk membeli barang melalui lelang semakin tinggi;
6. Citra lelang di masyarakat yang mulai baik dan didukung oleh diterapkannya *e-auction*;
7. Dukungan dari Penyerah Piutang yang tinggi dalam hal penyelesaian Pengurusan Piutang Negara;
8. Respon yang tinggi dari Penyerah Piutang dalam proses rekonsiliasi data piutang;

9. Perencanaan yang tepat dalam pengalokasian anggaran belanja;
10. Pemberian dukungan yang maksimal dan terpadu terhadap seluruh pegawai;

Walau demikian, tidak semua yang dihadapi KPKNL Purwokerto dapat berjalan dengan mudah. Pencapaian pelaksanaan kegiatan KPKNL Purwokerto pada tahun 2025 ternyata masih terdapat perolehan nilai capaian indikator kinerja utama yang belum memuaskan dan juga masih adanya beberapa permasalahan yang menonjol yang merupakan hambatan pada tahun 2025. Maka dari itu, untuk memperbaiki kinerja pada masa yang akan datang perlu dirumuskan strategi pemecahan masalah dimaksud sebagaimana telah diuraikan dalam komentar (ringkasan eksekutif) di atas. Dalam perjalanannya KPKNL Purwokerto menemukan beberapa kesulitan dan kendala ketika melaksanakan tugas. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Potensi dari PNBPN yang berasal dari BLU berkurang. Satker BLU Unsoed berproses menuju PTNBH, sehingga nantinya tidak diakui lagi sebagai PNBPN Aset.
2. Beberapa aset yang telah disetujui sewa tahun lalu merupakan Sewa dibayar diawal sewa untuk jangka waktu 2-5 tahun, sehingga potensi pendapatan sewa berkurang.
3. Satker Strategis bukan dalam pengelolaan KPKNL Purwokerto seperti DJKA, Tanah LP Nusakambangan, TNI.
4. Penyebab masih rendahnya atensi penanggung utang dalam upaya menyelesaikan tagihannya, yaitu keadaan ekonomi penanggung utang yang tidak mampu serta telah berakhirnya program dari pemerintah berupa keringanan utang di Tahun 2025.
5. Banyaknya lelang Tidak Ada Penawaran (TAP).
6. KPKNL tidak mempunyai kontrol terhadap pelaksanaan lelang pegadaian.
7. Satuan kerja Pengadilan Agama Wonosobo tidak dapat dilakukan optimalisasi berupa sewa dikarenakan ada aturan internal yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak boleh membuka kantin di dalam area Pengadilan Wonosobo dan untuk sewa berupa ATM juga tidak dimungkinkan karena jarak 100 meter dari Pengadilan Agama sudah terdapat ATM Centre.
8. Satker atau pengguna layanan kurang memahami mengenai standar layanan yang diberikan KPKNL.
9. Terdapat penghematan anggaran di satker. Anggaran di salah satu Satker (BBWS SO) hanya tersedia 12,5% (karena penghematan) dari semula 100%. Namun target raw data K1 belum menyesuaikan dengan anggaran yang dihemat.

10. Dalam penggunaan SIMAN V2 user belum familiar dengan menu yang baru, dan alur perhitungan evaluasi kinerja harus berjenjang ke Kanwil.
11. Penyelesaian BKPN pada Tahun 2025 berasal dari BKPN yang telah diurus secara optimal dimana penanggung utang dalam kondisi ekonomi tidak mampu dan tidak ditemukan keberadaannya sehingga diterbitkan surat PSBDT sedangkan penyelesaian BKPN yang berasal dari pelunasan oleh penanggung utang belum terdapat realisasi karena kondisi penanggung utang secara ekonomi tidak mampu dan telah berakhirnya program pemerintah berupa keringanan utang.
12. Rendahnya akurasi tingkat kesesuaian basis data pada permohonan penilaian BMN yang diinput pada aplikasi satu kemenkeu dengan permohonan penilaian yang diinput pada aplikasi Sistem Informasi Penilaian (SIP).
13. Adanya pembatalan lelang oleh pemohon lelang karena debitur melakukan pembayaran atau pelunasan hutang.

B. SARAN

Saran secara umum untuk kinerja KPKNL Purwokerto adalah mempertahankan dan meningkatkan kinerja bagi pejabat dan pegawai di KPKNL Purwokerto agar *output* dan *outcome* yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Dalam pemenuhan target capaian, saat ini KPKNL Purwokerto lebih fokus untuk menetapkan dan menerapkan strategi-strategi baru.

Adapun saran agar semakin dapat meningkatkan kinerja KPKNL Purwokerto adalah dengan menetapkan strategi yang dapat diimplementasikan melalui kerja keras dan kerja sama secara terpadu dari seluruh pegawai KPKNL, antara lain melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Meningkatkan mutu layanan menuju pelayanan prima, dan profesional kepada *stakeholder* dan menggerakkan satuan kerja untuk melakukan utilisasi Kekayaan Negara;
2. Monitoring dan evaluasi penyelesaian permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara dan menggerakkan satuan kerja untuk melakukan pengawasan dan pengendalian BMN, mengutilisasi Kekayaan Negara dan melakukan sertifikasi BMN;
3. Terus melakukan pembinaan dan bimbingan teknis mengenai penatausahaan dan pengelolaan BMN;

4. Melakukan program pendataan, verifikasi dan sertifikasi aset BMN berupa tanah bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional;
5. Meningkatkan penggalan potensi lelang dan sosialisasi lelang *e-auction*;
6. Mengadakan Sosialisasi Lelang Pasal 6 UUHT sesuai PMK No. 122 Tahun 2023 kepada kepada Pihak Perbankan dan Lembaga Keuangan di Wilayah Kerja KPKNL Purwokerto dan sosialisasi lelang *e-auction*;
7. Optimalisasi penggunaan aplikasi TIK dalam mendukung tugas dan fungsi diantaranya *e-auction* (Pelayanan Lelang) dan SIMAN (Pengelolaan Kekayaan Negara),
8. Menyelenggarakan sosialisasi secara berkesinambungan kepada *stakeholder* dalam rangka peningkatan pemahaman atas peraturan terkait seluruh tugas dan fungsi KPKNL;
9. Meningkatkan koordinasi dengan Kantor Wilayah, Kantor Pusat dan unit kerja eksternal baik instansi vertikal maupun Pemerintah Daerah;
10. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang terkait pengelolaan manajemen kinerja dan penerapan mitigasi risiko serta kepatuhan internal;
11. Mengoptimalkan kinerja pegawai melalui kegiatan yang bersifat lintas unit;
12. Meningkatkan kompetensi pegawai dengan menugaskan para pegawai untuk mengikuti berbagai diklat agar menjadi pegawai multi talenta;
13. Pelaksanaan *capacity building* internal pegawai KPKNL Purwokerto secara berkala;
14. Memberikan motivasi kepada para pegawai sehingga tercipta suasana kerja harmonis dan bersemangat untuk melebihi capaian target;
15. Melakukan internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan, penerapan budaya kerja untuk mendukung Transformasi Kelembagaan;
16. Monitoring dan evaluasi penyelesaian permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara dan menggerakkan satuan kerja untuk melakukan pengawasan dan pengendalian BMN, utilisasi kekayaan Negara dan sertifikasi BMN;
17. Melaksanakan kegiatan SEMBARI “Semangat Menyambut Mentari” yaitu program sapa pagi dari Kepala KPKNL Purwokerto untuk memastikan semua pegawai dalam keadaan sehat dan *me-riveuw* agenda pelaksanaan tugas yang akan dilaksanakan;
18. Melaksanakan program BLAKASUTA “Blak – Blakan Suka Cerita” yaitu program sharing informasi terkait tugas dan peraturan terbaru dari masing - masing Seksi

dan Fungsional, sehingga seluruh pegawai dapat memahami tugas dan fungsi KPKNL Purwokerto dengan baik.

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto tahun anggaran 2025 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas dan fungsi berdasarkan peraturan yang berlaku.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja khususnya Laporan Kinerja KPKNL Purwokerto Tahun Anggaran 2025 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, baik kepada Pimpinan Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta dan Kantor Pusat DJKN maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing yang pada akhirnya dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pula pada masa yang akan datang serta sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan di tahun-tahun berikutnya.



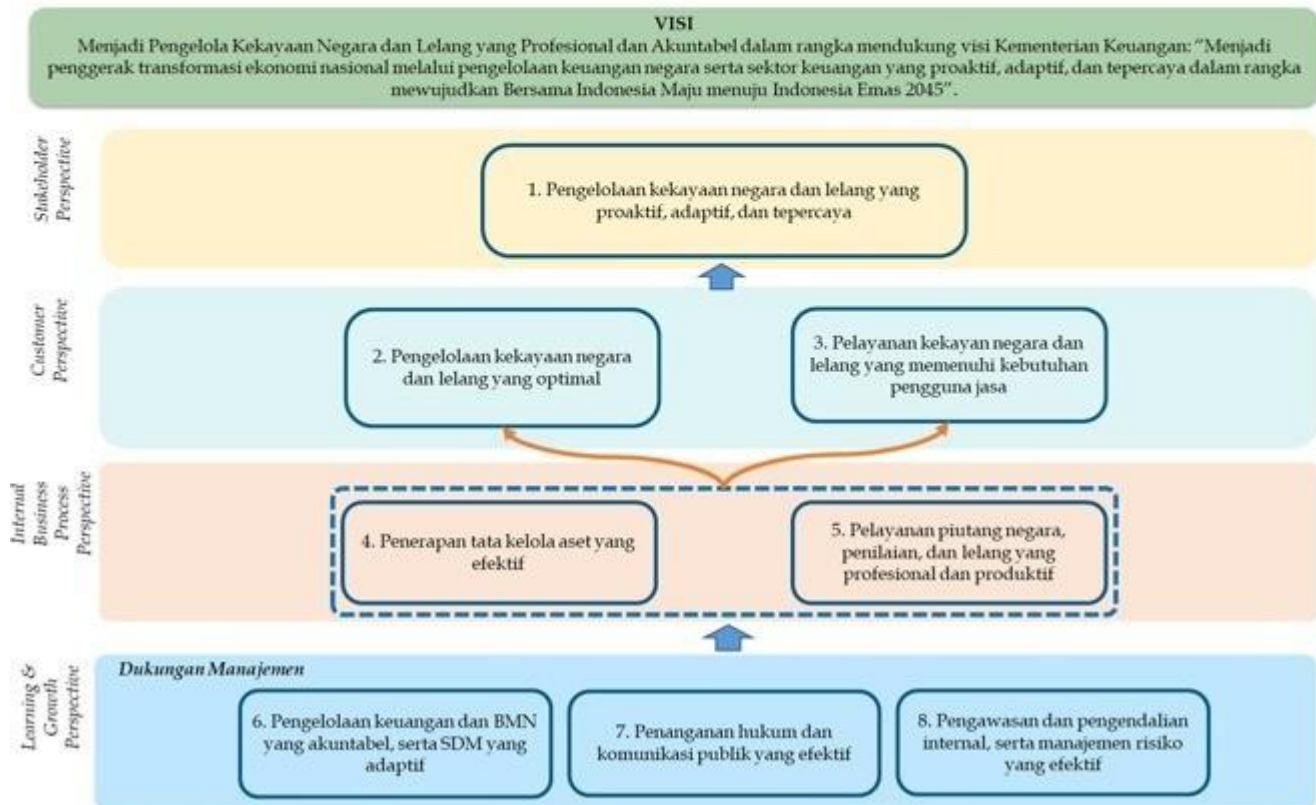
PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-06/WKN.09/2025
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PURWOKERTO
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PURWOKERTO
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	1a-CP	Indeks integritas	100
		1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp14 M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp199,5 M)
		2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp2 M)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
		3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP	Indeks Kualitas Kinerja Anggaran	100
		6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100
		7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80
		8b-N	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	95.3%

Program/Kegiatan 2025

Anggaran

Program:



Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	Rp540,383,000
Kegiatan	
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp62,184,000
2. Pengelolaan Aset	Rp478,199,000
Program:	
Dukungan Manajemen	Rp2,841,831,000
Kegiatan	
1. Legislasi dan Litigasi	Rp78,580,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp2,695,072,000
3. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp43,319,000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp24,860,000

PURWOKERTO SELATAN, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Jawa Tengah dan
D.I.Yogyakarta



Ditandatangani Secara Elektronik
Tri Wahyuningsih Retno Mulyani

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang Purwokerto



Ditandatangani Secara Elektronik
Ali Mahmud



RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PURWOKERTO
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							
1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp14 M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp199,5 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp2 M)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif							
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
6a-CP	Indeks Kualitas Kinerja	100	100	100	100	100	100	100



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	Anggaran							
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80
8b-N	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	75.5%	82.5%	82.5%	89.75%	89.75%	95.3%	95.3%

PURWOKERTO SELATAN, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto



Ditandatangani Secara Elektronik
Ali Mahmud



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWOKERTO
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	Kompetisi Inovasi Manajer Aset (KOIN MAS) DJKN	Jumlah aset yang diberdayakan dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat	Januari - Maret	Inventarisasi terhadap aset yang akan diberdayakan/dimanfaatkan	Daftar Asset yang Akan diberdayakan/dimanfaatkan	Q1-Q4	1. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto	0
				April - Juni	Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Laporan Kegiatan Monitoring			
				Juli - September	Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Laporan Kegiatan Monitoring			
				Oktober - Desember	Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Laporan Hasil Evaluasi Kegiatan			



PURWOKERTO SELATAN, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto



Ditandatangani Secara Elektronik
Ali Mahmud



**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Ali Mahmud		NAMA	Tri Wahyuningsih Retno Mulyani
NIP	19710711 199703 1 002		NIP	19650304 199103 2 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I (IV/b)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya (IV/d)
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	Indeks integritas	100	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp14 M)	Penerima Layanan
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	Penerima Layanan
		Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp199,5 M)	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp2 M)	Penerima Layanan
3	Pelayanan kekayan negara dan lelang yang memenuhi	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	Penerima Layanan
		Indeks kepuasan pengguna layanan	77	Penerima Layanan

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



	kebutuhan pengguna jasa			
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	Proses Bisnis
		Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	Proses Bisnis
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	Proses Bisnis
		Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	80%	Proses Bisnis
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	Indeks Kualitas Kinerja Anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	95.3%	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				



PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> -Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah -Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara -Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> -Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan -Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas -Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> -Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi -Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah -Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



PURWOKERTO SELATAN, 30 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik
Tri Wahyuningsih Retno Mulyani
19650304 199103 2 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik
Ali Mahmud
19710711 199703 1 002

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	39 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp14 M)
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp199,5 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp2 M)
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77



4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
6a-CP	Indeks Kualitas Kinerja Anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80
8b-N	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	75.5%	82.5%	82.5%	89.75%	89.75%	95.3%	95.3%

KONSEKUENSI

Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.



PURWOKERTO SELATAN, 30 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik
Tri Wahyuningsih Retno Mulyani
19650304 199103 2 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik
Ali Mahmud
19710711 199703 1 002

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025

